

Penyusunan Arsitektur SPBE Menggunakan TOGAF ADM dan Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Nasional di Pemerintahan Kota Cimahi pada Fungsi Kearsipan

Tiara Azuraliyawan, Ridha Hanafi, dan Widyatasya Agustika Nurtrisha

Program Studi Sistem informasi, Universitas Telkom, Bandung

Jl. Telekomunikasi No.1, Terusan Buahbatu - Bojongsoang, Sukapura, Dayeuhkolot,
Bandung, Jawa Barat 40257

E-mail :tiaraaz6194@gmail.com, ridhanafi@telkomuniversity.ac.id, widyatasya@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Teknologi informasi kini menjadi elemen penting bagi organisasi, termasuk sektor publik, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi belum memiliki perancangan arsitektur enterprise yang sesuai dengan pedoman SPBE. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya kesesuaian arsitektur SPBE yang diterapkan dengan kebutuhan Fungsi Kearsipan, serta belum adanya rancangan yang terstruktur untuk mendukung optimalisasi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai arsitektur SPBE saat ini dan merancang model baru yang dapat mengoptimalkan layanan kearsipan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat integrasi antar OPD di Kota Cimahi. Pendekatan yang digunakan adalah kerangka kerja TOGAF ADM untuk menyusun arsitektur yang lebih efektif. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan rancangan arsitektur enterprise yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan arsip secara lebih terintegrasi dan sesuai standar nasional.

Kata kunci : Arsitek Enterprise (EA), Dinas Arsip Daerah, Fungsi Kearsipan, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), TOGAF ADM.

Pendahuluan

Teknologi informasi kini sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap organisasi dalam menjalankan setiap aspek operasionalnya. Saat ini penerapan teknologi informasi tidak hanya digunakan pada sektor bisnis saja, namun juga pada sektor publik untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Salah satu konsep pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam sektor pemerintahan sebagai bentuk pengelolaan dan peningkatan pelayanan publik disebut dengan sistem *e-Government* atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) [1]. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan badan pengatur pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menciptakan jaringan informasi pelayanan publik, menjalin hubungan interaktif untuk meningkatkan perekonomian nasional, menjalin hubungan, dan menjalin hubungan dengan sejumlah organisasi publik, serta membentuk sistem pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Pemantauan dan evaluasi SPBE pada instansi pemerintah telah diatur oleh Menteri Sekretaris Negara. Peraturan PAN dan Rb Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE, menjadi tolak ukur untuk mengukur tingkat kematangan dan kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan spbe pada instansi pemerintah berupa harga, nilai kinerja indeks SPBE [2].

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlaku di tingkat nasional, pada instansi pusat dan daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif, transparansi dan akuntabilitas, serta terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan dapat diandalkan [3]. Melalui Peraturan Sekretaris PANRB tentang Pedoman Evaluasi Sistem *E-Government* disebutkan bahwa untuk mencapai pelaksanaan SPBE di setiap pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan tujuannya, maka harus dilakukan penilaian secara berkala [4].

Hasil evaluasi pelaksanaan SPBE pada tahun 2022 oleh Kemen PANRB, Pemerintah Daerah Kota

Cimahi mendapat nilai indeks SPBE 3,09 dengan predikat SPBE yaitu baik [5]. Meskipun Kota Cimahi telah menerapkan SPBE dengan capaian indeks 3,09, layanan Fungsi Kearsipan di Dinas Arsip Daerah masih belum optimal, terutama dalam menyediakan akses arsip statis secara virtual. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya integrasi teknologi yang mendukung akses arsip secara online, sehingga masyarakat harus mengunjungi lokasi fisik untuk mendapatkan arsip. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pengembangan arsitektur enterprise yang akan mencakup rancangan sistem yang lebih terintegrasi dan digital. Dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM, penelitian ini diharapkan menghasilkan blueprint arsitektur SPBE yang mampu meningkatkan efisiensi layanan arsip, memfasilitasi akses virtual oleh publik, dan memperkuat koordinasi antar OPD di Kota Cimahi. Sesuai dengan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE untuk mewujudkan tata kelola SPBE yang terpadu antara instansi pusat dan instansi daerah perlu adanya transformasi mendasar pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan SPBE. Meski Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dikeluarkan untuk mendorong penerapan SPBE di tingkat nasional, namun hasil evaluasi Kementerian PANRB tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemda Kota Cimahi masih perlu untuk mengoptimalkan pada layanan publik dan juga administrasi pemerintahan yang baik [6]. Perbaikan tersebut memerlukan optimalisasi, standarisasi teknologi informasi, mengingat kondisi pelayanan publik di Kota Cimahi saat ini cenderung belum terintegrasi dan masih sebagian dipisahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas integrasi proses. Diperlukan langkah konkrit untuk meningkatkan koordinasi dan tata kelola SPBE agar pelayanan publik dapat lebih terintegrasi di Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan menjadi lebih efisien.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian tugas akhir ini difokuskan kepada Dinas Arsip Daerah sebagai objek penelitian dan lebih difokuskan lagi ke bagian Fungsi Kearsipan. Pada Fungsi Kearsipan, terdapat permasalahan layanan arsip statis saat ini belum optimal, terutama dalam menyediakan akses virtual bagi publik. Layanan ini penting agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses arsip di Kota Cimahi secara online, tanpa perlu datang langsung. Optimalisasi dapat dilakukan melalui pengembangan platform digital yang mudah digunakan. Selain itu, diperlukan edukasi kepada publik mengenai cara penggunaan layanan ini. Dengan layanan yang lebih optimal, diharapkan akses arsip oleh masyarakat menjadi lebih cepat dan mudah, guna mendukung transparansi dan pelestarian budaya di Kota Cimahi. Sebagai hasilnya, penelitian ini akan berfokus pada pengembangan *enterprise architecture* dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM, yang didasarkan pada Perpres No.132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE

Nasional [7] untuk Fungsi Kearsipan. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan/*blueprint* arsitektur SPBE yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan integrasi layanan publik serta administrasi pemerintahan antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Cimahi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini pada penggunaan kerangka kerja arsitektur SPBE yang dipetakan dalam domain arsitektur TOGAF.

Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Nasional

Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional disusun berdasarkan kerangka kerja SPBE sebagai panduan untuk menerapkan dan pengelolaan SPBE Nasional. Dengan tujuan mewujudkan keterpaduan antar struktur pada Arsitektur SPBE, maka kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional ini yang akan menjadi panduan untuk mengidentifikasi pembentukan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi, meniadakan tumpang tindih pelaksanaan proses bisnis, dan memastikan penerapan data dan informasi berbagi pakai menjadi Satu Data Indonesia, melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Arsitektur SPBE memiliki 6 domain di dalamnya, yaitu:

1. Domain arsitektur proses bisnis
2. Domain arsitektur data dan informasi
3. Domain arsitektur layanan SPBE
4. Domain arsitektur aplikasi SPBE
5. Domain arsitektur infrastruktur SPBE
6. Domain arsitektur keamanan SPBE

TOGAF

TOGAF *Framework*, yang dikenal sebagai *The Open Group Architecture Framework*, merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Awalnya, kerangka kerja ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS (DoD) pada tahun 1995. Saat ini, banyak organisasi yang mengadopsi TOGAF sebagai panduan dalam merancang arsitektur mereka. TOGAF menyediakan metode dan alat untuk mendukung proses penerimaan, pembuatan, operasionalisasi, dan pemeliharaan arsitektur perusahaan. TOGAF memiliki 4 domain arsitektur, yang meliputi hal-hal berikut :

1. Arsitektur Bisnis

2. Arsitektur Data
3. Arsitektur Aplikasi
4. Arsitektur Teknologi

Pemetaan pada Domain TOGAF dan Domain Arsitektur SPBE

Tahap analisis dan perancangan penelitian ini bertujuan untuk merancang EA SPBE yang ditargetkan berdasarkan kondisi baseline pada objek yang telah ditentukan. Perancangan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan *framework* TOGAF ADM 9.2. Metode TOGAF ADM 9.2 merupakan pembaruan dari versi sebelumnya, memberikan instruksi yang lebih baik, memperbaiki struktur dokumen, memperbaiki kesalahan dan menghilangkan elemen yang tidak layak digunakan. Termasuk pembaruan metamodel dalam Arsitektur Bisnis merupakan perbaikan yang paling signifikan pada versi terbaru ini [8]. Selain mengacu pada TOGAF ADM 9.2, perancangan artefak yang dilakukan pada penelitian ini juga dilakukan dengan mengadaptasi peraturan pemerintah tentang Arsitektur SPBE, khususnya berdasarkan Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Oleh karena itu, berdasarkan hasil penyesuaian tersebut, artefak yang dibuat meliputi fase *preliminary architecture vision, business architecture, data architecture, application architecture, dan service architecture*. Tabel 1 adalah pemetaan *mapping domain*.

Tabel 1: Pemetaan Domain

Fase Arsitektur SPBE	Fase TOGAF
Architecture Vision	Phase A: Architecture Vision
Arsitektur Proses Bisnis	Phase B: Business Architecture
Arsitektur Layanan	Phase A: Architecture Vision
Arsitektur Data dan Informasi	Phase C: Information System Architecture – Data Architecture
Arsitektur Aplikasi	Phase C: Information System Architecture – Application Architecture
Arsitektur Teknologi/Infrastruktur	Phase D: Technology Architecture
Arsitektur Keamanan	Phase A: Architecture Vision Phase B: Business Architecture Phase C: Information System Architecture-Data Architecture Phase D: Technology Architecture

Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data digunakan untuk membantu peneliti mengidentifikasi tujuan utama dan masalah yang timbul dalam objek organisasi[9]. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada pemangku kepentingan di

Fungsi Kearsipan Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi. Data sekunder diperoleh dari temuan pengetahuan dalam publikasi penelitian, jurnal penelitian yang relevan, penelitian terdahulu mengenai Arsitektur *Enterprise* dan *E-Government* serta penelitian literatur organisasi terkait. Tabel 2 berisi data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2: Pengumpulan Data

Jenis Data	Sumber Data	Penggunaan Data
Data Primer	Hasil wawancara dengan Fungsi Kearsipan Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi.	Untuk memvalidasi terkait penyusunan arsitektur layanan
	Buku Kondisi Existing Arsitektur SPBE Kota Cimahi	Memberikan Informasi mengenai keadaan existing pada Fungsi Kearsipan Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi
	Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018	Sebagai dasar penyusunan arsitektur SPBE
Data Sekunder	Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018	Sebagai panduan dalam penyusunan arsitektur layanan SPBE
	UU No. 23 tahun 2014	Sebagai pedoman dalam tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah
	Rencana Strategis Dinas Arsip Daerah Tahun 2023-2026	Sebagai panduan dalam mengidentifikasi isu permasalahan dan program dari Fungsi Kearsipan.

Hasil dan Pembahasan

Architecture Vision

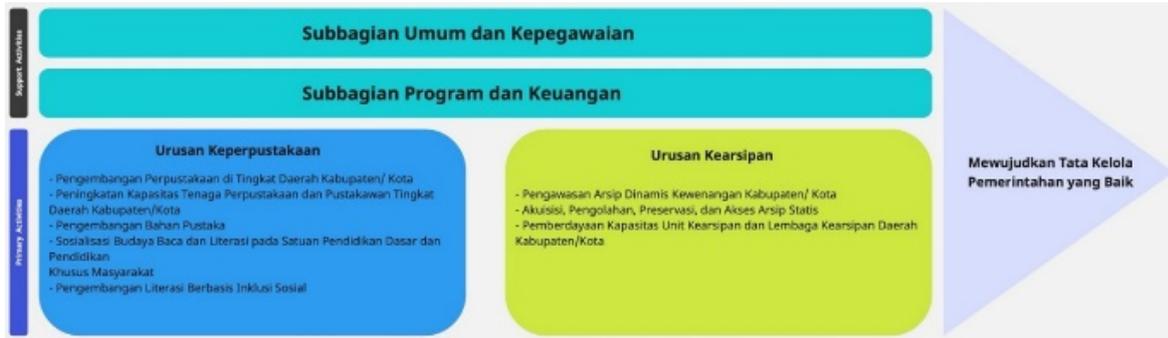
Architecture vision merupakan tahap pertama dalam perkembangan arsitektur. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan ruang lingkup perancangan EA yang akan diterapkan, pemangku kepentingan terkait, dan persetujuan organisasi terhadap perancangan EA yang akan diimplementasikan. *Stakeholder Map Matrix, Value Chain Diagram, dan Solution Concept Diagram* adalah hasil dari fase ini.

Value Chain Diagram

Value chain diagram digunakan untuk mengkatégorikan, menganalisis, dan memahami aktivitas yang menciptakan nilai suatu produk atau layanan, menciptakan nilai bagi pelanggan, dan dengan demikian membantu mencapai keunggulan yang kompetitif. *Value chain diagram* dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu *primary activities* dan *support activities*. *Primary activities* merupakan kegiatan utama untuk melakukan penghasilan nilai, sehingga berhubungan langsung dengan proses utama yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan

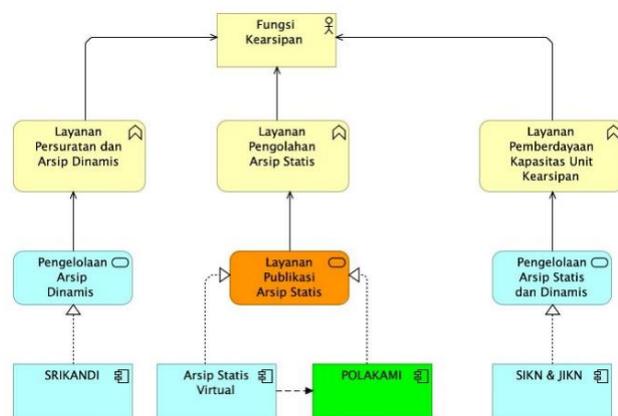
support activities merupakan pendukung dalam operasi perusahaan secara keseluruhan untuk memak-

simalkan hasil. Gambar 1 adalah *value chain diagram* dari Dinas Arsip Daerah.



Gambar 1: *Value Chain Diagram*

Pada *Value Chain Diagram* di atas, dipaparkan bahwa terdapat dua aktivitas dari Dinas Arsip Daerah, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung, aktivitas utama berfokus pada urusan perpustakaan, yang mencakup pengembangan perpustakaan, peningkatan kapasitas tenaga kerja perpustakaan, pengembangan bahan pustaka, pelaksanaan sosial budaya baca kepada masyarakat, dan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial. Pada urusan kearsipan, berfokus pada pengawasan arsip, akuisisi, pengolahan, dan perservasi arsip, serta pemberdayaan unit tenaga kerja kearsipan. Sementara itu pada aktivitas pendukung, berfokus pada aktivitas dari sub-bagian umum dan kepegawaian serta sub-bagian program dan keuangan.



Gambar 2: *Solution Concept Diagram*

Solution Concept Diagram

Solution concept diagram adalah deskripsi tingkat tinggi dari solusi yang diusulkan untuk mengatasi suatu masalah atau kebutuhan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan *stakeholder* dan sebagai dasar untuk pengembangan solusi lebih lanjut. Berikut merupakan gambar dari solution concept diagram pada Fungsi Kearsipan di Dinas Arsip Daerah. Berdasarkan Gambar 2 diagram dibawah ini menunjukkan bahwa adanya pengembangan aplikasi untuk mendukung operasi bisnis yang dijalankan.

Solution Concept Diagram diatas menggambarkan alur fungsi kearsipan yang mencakup pengelolaan arsip dinamis dan statis. Fungsi Kearsipan terbagi dalam tiga layanan utama yaitu, Layanan Persuratan dan Arsip Dinamis, yang didukung oleh sistem SRIKANDI, Layanan Pengolahan Arsip Statis yang dikelola melalui *Arsip Statis Virtual*, dan Layanan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan yang terintegrasi dengan SIKN & JIKN. Selain itu, terdapat Layanan Publikasi Arsip Statis yang berfokus pada penyebarluasan arsip melalui platform POLAKAMI. Diagram ini menunjukkan integrasi platform digital dalam pengelolaan dan publikasi arsip.

Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur proses bisnis merupakan fase kedua dari TOGAF ADM yang menjelaskan tentang kebutuhan suatu organisasi dalam menjalankan fungsi bisnis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk bagaimana tujuan bisnis dan interaksinya saling terkait. Dan juga pada fase perancangan arsitektur proses bisnis ini didasari oleh Permenpan No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah [10]. Pada perancangan ini juga mencakup proses bisnis eksisting dan targetting yang diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kinerja pada Fungsi Kearsipan di Dinas Arsip Daerah.

Business Footprint Diagram

Business Footprint Diagram digunakan *Business Footprint Diagram* digunakan untuk menjelaskan bagaimana tujuan bisnis, unit organisasi, fungsi bisnis, dan layanan yang berhubungan satu sama lain, dan memetakan fungsi-fungsi tersebut ke komponen teknis yang memberikan kapabilitas yang dibutuhkan. Tujuan pembuatan diagram ini untuk membuat perusahaan atau organisasi lebih mudah melihat alur tujuan yang dapat dicapai sesuai

dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Gambar 10 adalah *Business Footprint Diagram* Fungsi Kearsipan.



Gambar 3: *Business Footprint Diagram* Fungsi Kearsipan

Diagram *Business Footprint* di atas menggambarkan hubungan antara visi Cimahi Kota Cerdas dan pentingnya pengelolaan arsip dalam tata kelola pemerintahan. Untuk mencapai tata kelola yang baik, diperlukan pengelolaan arsip yang lebih baik, terutama arsip bernilai sejarah yang belum terkelola dengan baik dan belum dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Dengan mengatasi masalah ini, tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta layanan informasi kearsipan dapat tercapai, yang pada akhirnya mendukung visi Kota Cerdas melalui pengelolaan Arsip Statis secara efektif.

Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur Data dan Informasi menjelaskan tentang perancangan data yang digunakan perusahaan atau

organisasi serta semua data yang diperlukan untuk merancang *Arsitektur Enterprise*. *Arsitektur data* juga masuk ke dalam salah satu perancangan fase C yaitu *Arsitektur Sistem Informasi*. Dalam perancangan ini akan ditunjukkan jenis data dan sumber data yang berfungsi untuk mendukung jalannya proses bisnis.

Data Dissemination Diagram

Data dissemination diagram bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara komponen aplikasi, entitas data, dan layanan bisnis di Fungsi Kearsipan Kota Cimahi. Diagram ini dibuat berdasarkan katalog aplikasi/entitas data. Gambar 4 adalah *data dissemination diagram* di Fungsi Kearsipan.

Diagram *Data Dissemination* di atas menunjukkan alur penyebaran data melalui beberapa komponen aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan arsip. SRIKANDI menangani data persuratan dan arsip dinamis elektronik. Layanan Publikasi Arsip Statis Virtual mengelola data arsip statis, baik fisik maupun digital. SIKN & JIKN menangani data arsip dinamis elektronik serta arsip statis digital, termasuk data identitas pengunjung dan surat izin pengajuan. POLAKAMI berfokus pada penyebaran data layanan. Diagram ini menggambarkan integrasi berbagai aplikasi untuk pengelolaan dan penyebaran data arsip secara efektif di berbagai platform.

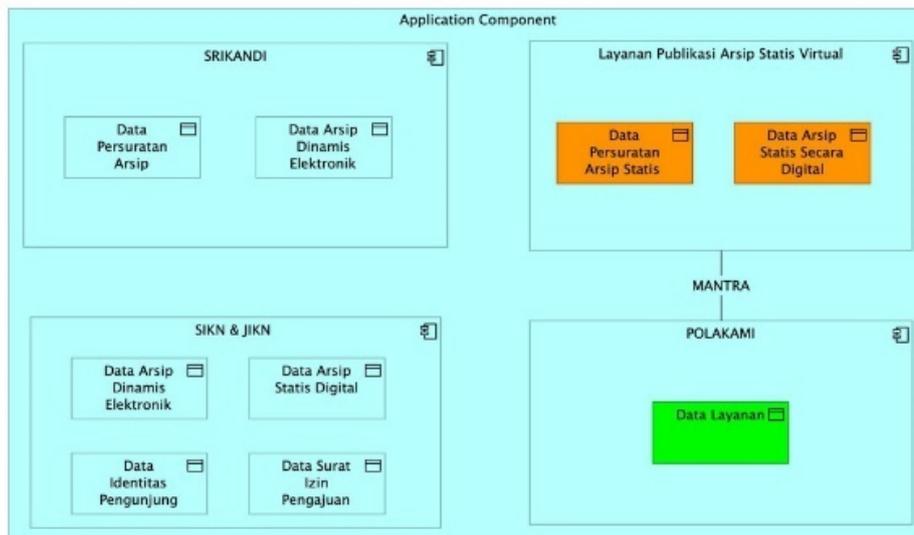
Arsitektur Aplikasi

Arsitektur aplikasi merupakan face C dalam TOGAF ADM yang menjelaskan tentang *Arsitektur Sistem Informasi* selain *arsitektur data*. Tujuan dari penyusunan *arsitektur aplikasi* ini adalah untuk menghubungkan aplikasi dengan proses bisnis dan pengelolaan data pada organisasi/perusahaan.

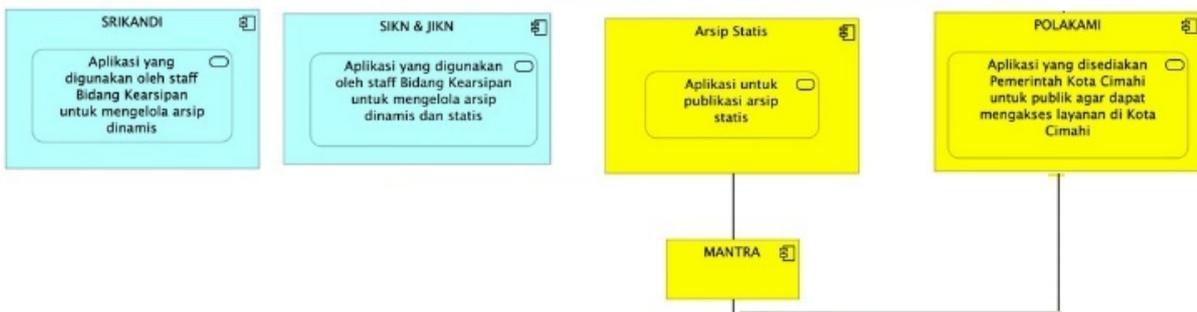
Application Communication Diagram

Application communication diagram bertujuan untuk menjelaskan atau memvisualisasikan *application interface catalog*, sehingga hubungan dan interaksi antar aplikasi dapat dipahami dengan lebih baik. Gambar 5 adalah *application communication diagram* di Fungsi Kearsipan.

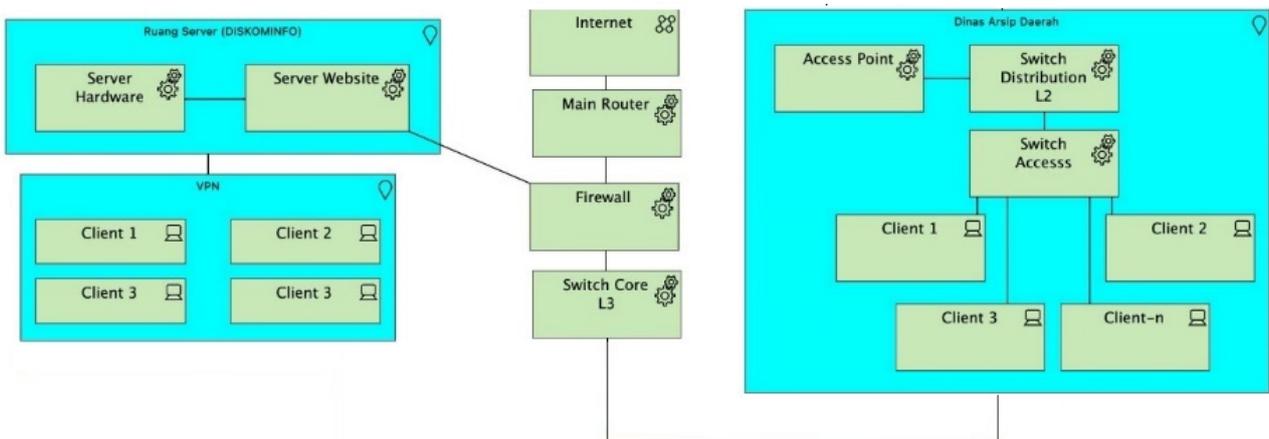
Gambar 6 merupakan rancangan *wireframe* halaman Beranda SIMAS dari hasil penerapan ide solusi yang telah dibuat. Dilakukan perubahan layout tampilan yang sesuai kebutuhan dari pengguna. Semua fitur yang ada dikelompokkan menjadi satu sesuai dengan topik yang sama agar dapat mempermudah pengguna untuk mencari menu yang diinginkan.



Gambar 4: *Data Dissemination Diagram*



Gambar 5: *Application Communication Diagram*



Gambar 6: *Environment and Location Diagram*

Diagram tersebut menggambarkan infrastruktur jaringan yang terdiri dari beberapa lokasi dan komponen utama. Pada bagian Ruang Server (DISKOMINFO), terdapat *Server Hardware* dan *Server Website* yang terhubung ke jaringan. Server ini dihubungkan ke jaringan melalui *Main Router*, *Firewall*, dan *Switch Core L3* yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data.

Dari *Switch Core L3*, jaringan terhubung ke bagian VPN yang mencakup beberapa *Client* (*Client 1, 2, dan 3*) serta ke Dinas Arsip Daerah. Di Dinas Arsip Daerah, terdapat *Access Point*, *Switch Distribution L2*, dan *Switch Access* yang mendistribusikan koneksi ke beberapa Client (*Client 1, 2, 3, hingga Client-n*). Diagram ini menunjukkan bagaimana jaringan diatur dan dihubungkan antara server, klien, serta dinas terkait melalui berbagai komponen jaringan seperti *router*, *firewall*, dan *switch*.

Arsitektur Layanan

Arsitektur layanan adalah pemisahan proses bisnis berdasarkan tanggung jawab dan fungsi spesifiknya. Tujuan dari arsitektur layanan adalah untuk menggambarkan layanan yang disediakan oleh suatu proses bisnis, serta data dan aplikasi yang digunakan dalam penyediaan layanan tersebut. Menurut Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerin-

tah Berbasis Elektronik Nasional, dikatakan bahwa layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan (*benefits*) untuk para penggunanya.

Katalog Layanan dan Matrik Layanan/Proses Bisnis

Katalog layanan berisi pemetaan layanan yang disediakan oleh Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi. Katalog ini mencakup informasi tentang layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik pada Fungsi Kearsipan Kota Cimahi, aplikasi yang mendukung layanan tersebut, serta pihak yang menyediakan layanan tersebut. Tabel 3 adalah pemetaan katalog layanan pada Fungsi Kearsipan di Dinas Arsip Daerah. Sedangkan untuk Matrik layanan/proses bisnis menggambarkan hubungan antara layanan pada proses bisnis level 3 dengan unit kerja atau pemangku kepentingan terkait di Bidang Kearsipan. Tabel 4 adalah pemetaan dari matriks layanan/ proses bisnis pada Bidang Kearsipan.

Tabel 3: Katalog Layanan

Proses Bisnis (X) / Unit Kerja (Y)	Kepala Dinas	Sekretariat	Kelompok Jabatan Fungsional	Kepala Bidang Kearsipan	Kepala Bidang Keperpustakaan
Kearsipan 02.01.01.01 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	N/A	Layanan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan kabupaten/Kota	N/A
Kearsipan 02.01.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	N/A	N/A	N/A	Layanan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	N/A
Kearsipan 02.01.03.03 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota.	N/A	N/A	N/A	Layanan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	N/A

Arsitektur Keamanan

Berdasarkan Perpres No.132 Tahun 2022 tentang SPBE Nasional, arsitektur keamanan SPBE adalah langkah yang diambil untuk mengendalikan keamanan pada arsitektur sebelumnya melalui identifikasi program keamanan, penilaian kelaikan kea-

manan, dan regulasi yang mengatur keamanan. Referensi arsitektur keamanan (RAK) dalam arsitektur keamanan ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, standar keamanan (RAK01), penerapan keamanan (RAK02), dan kelaikan keamanan (RAK03). Adapun tujuan dari arsitektur kea-

manan yaitu, untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE Nasional dan menjadi acuan bagi

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelayakan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

Tabel 4: Matrik Layanan/Proses Bisnis

Proses Bisnis (X) / Unit Kerja (Y)	Kepala Dinas	Sekretariat	Kelompok Jabatan Fungsional	Kepala Bidang Kearsipan	Kepala Bidang Keperpustakaan
Kearsipan 02.01.01.01 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	N/A	Layanan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan kabupaten/Kota	N/A
Kearsipan 02.01.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	N/A	N/A	N/A	Layanan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	N/A
Kearsipan 02.01.03.03 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota.	N/A	N/A	N/A	Layanan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	N/A

Tabel 5: Standar Keamanan

Standar	Deskripsi	Keterangan	Saran
Standar Teknis & Prosedur Keamanan SPBE (01.01)			
Peraturan BSSN No.4 Tahun 2021	Peraturan ini menjadi pedoman dalam manajemen keamanan informasi SPBE.	Belum diimplementasikan	Peraturan BSSN No.4 Tahun 2021 harus diimplementasikan agar manajemen keamanan informasi SPBE sesuai dengan kebijakan yang berlaku
Standar Keamanan Internasional (01.02)			
ISO 27001: 2022	ISO 27001 menetapkan kerangka kerja bagi semua organisasi untuk menetapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi.	Sudah sebagian diimplementasikan	ISO 27001 masih terus diimplementasi agar manajemen keamanan informasi dapat dilaksanakan dengan maksimal
Regulasi Tambahan (01.03)			
Peraturan Walikota Cimahi 53 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah Kota Cimahi	Merupakan panduan dalam penggunaan sertifikat elektronik yang meliputi proses permohonan, penerbitan, dan pencabutan sertifikat elektronik	Sertifikat elektronik sudah mulai digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, namun penerapannya belum merata	Mempercepat proses sosialisasi dan penerapan sertifikat elektronik di seluruh ASN Pemerintah Kota Cimahi

Berdasarkan Perpres No.132 Tahun 2022 tentang SPBE Nasional, arsitektur keamanan SPBE adalah langkah yang diambil untuk mengendalikan keamanan pada arsitektur sebelumnya melalui identifikasi program keamanan, penilaian kelaikan keamanan, dan regulasi yang mengatur keamanan. Referensi arsitektur keamanan (RAK) dalam arsitektur keamanan ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, standar keamanan (RAK01), penerapan keamanan (RAK02), dan kelaikan keamanan (RAK03). Adapun tujuan dari arsitektur keamanan yaitu, untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE Nasional dan menjadi acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelayakan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

Standar Keamanan

Berdasarkan Perpres No.132 Tahun 2022, standar keamanan berfungsi sebagai acuan persyaratan keamanan bagi instansi pusat dan pemerintah daerah. Standar ini memastikan bahwa fungsi keamanan diterapkan pada data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE, sesuai dengan kriteria keamanan yang telah ditetapkan. Tabel 5 adalah pemetaan standar keamanan di Pemerintah Kota Cimahi.

Penerapan Keamanan

Berdasarkan Perpres No.132 Tahun 2022, penerapan keamanan adalah rangkaian proses dalam program-program keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi dampak resiko terkait keamanan SPBE. Tabel 6 adalah pemetaan penerapan keamanan di Pemerintah Kota Cimahi.

Tabel 6: Penerapan Keamanan

Program Keamanan	Deskripsi	Keterangan	Saran
Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE (02.01)			
Sosialisasi edukasi kesadaran keamanan dan pelatihan keamanan	Mengadakan sosialisasi dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan keamanaan infromasi dan keterlibatan ASN dalam pengelolaan keamanan serta aplikasi SPBE	Sudah dilakukannya sosialisasi keamanan dengan jargon #JUMATKAMI (Jumat Kabar Keamanan Informasi)	Metode interaktif seperti simulasi insiden keamanan atau studi kasus dapat ditambahkan dalam pelatihan untuk meningkatkan pemahaman praktis ASN
Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE (02.02)			
Identifikasi Kerentanan dan Ancaman Terhadap Aset SPBE	Evaluasi terhadap potensi kerentanan dan ancaman pada aset SPBE	Belum dilakukan secara maksimal	Harus memaksimalkan terkait pelaksanaan identifikasi Kerentanan dan Ancaman Terhadap Aset SPBE
Peningkatan Keamanan SPBE (02.03)			
Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan	Pelaksanaan kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan	Pelaksanaan kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan	Meningkatkan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan di semua OPD.
Penanganan Insiden Keamanan SPBE (02.04)			
Identifikasi Insiden	Pelaksanaan identifikasi dan analisis untuk mendeteksi dan merespons insiden serta meminimalkan risiko	Sudah terdapat Tim Cimahi-CSIRT	Perlu meningkatkan kapasitas dan pelatihan rutin untuk tim Cimahi-CSIRT agar selalu siap dalam menangani insiden terbaru.
Prosedur Penanganan Insiden Mitigasi Risiko	Pelaksanaan kegiatan dalam penanganan langkah-langkah insiden isniden dan tindakan pencegahan	Sudah terdapat Tim Cimahi-CSIRT	Pembaruan prosedur penanganan insiden berdasarkan evaluasi dan Pelajaran yang didapat dari insiden sebelumnya.
Audit Keamanan SPBE (02.05)			
Proses kegiatan audit keamanan SPBE	Pelaksanaan audit keamanan SPBE untuk mengukur kesesuaian penerapan standar keaman SPBE	Sudah dilakukan <i>self-assessment</i> KAMI, namun belum dilakukan verifikasi oleh BSSN	Sudah dilakukan <i>self-assessment</i> KAMI, namun belum dilakukan verifikasi oleh BSSN

Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur enterprise yang mendukung Sistem Pemerin-

tahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM. Berdasarkan hasil penelitian, ran-

cangan arsitektur yang diusulkan mampu mengintegrasikan sistem yang ada dan memperbaiki manajemen data, sehingga meningkatkan kualitas layanan arsip secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, penelitian ini telah berhasil menjawab tujuan penelitian, yaitu menciptakan rancangan arsitektur yang mendukung optimalisasi layanan kearsipan di Kota Cimahi. Implementasi rancangan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Cimahi.

Daftar Pustaka

- [1] B. G. Sudarsono dan S. P. Lestari, "Kajian Literatur Model Konseptual Keberhasilan E-Government", KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer), vol. 2, no. 1, 2018.
- [2] Anonim. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2020.
- [3] Anonim, "Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," Sekretariat Presiden, 2018
- [4] Anonim, "Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2018.
- [5] Anonim, "Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah," Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2023.
- [6] Anonim, "Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2022 Tentang Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022," Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2022.
- [7] Anonim, Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional," Sekretariat Presiden, 2022.
- [8] A. S. Alfain, A. A. N. Fajrillah, dan R. Hanafi, "Analisis dan Perancangan Arsitektur Enterprise Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menggunakan TOGAF ADM 9.2," JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), vol. 8, no. 1, pp. 127–139, doi: 10.29100/jipi.v8i1.3311, Feb. 2023.
- [9] Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif (Materi Kuliah Metodologi Penelitian Indonesia)," UIN Maliki Malang, 2011.
- [10] Anonim, "Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2018.